

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi sekolah yang sudah bergulir 3 tahun ini dapat dipandang sebagai langkah maju, pasalnya, akreditasi dimaksudkan untuk mewujudkan mutu pendidikan bangsa sehingga sekolah swasta yang terakreditasi akan diminati calon siswa. Bagi sekolah negeri yang tidak terakreditasi tak mustahil akan ditinggalkan calon siswanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mc. Kenna (1991, dalam Retno, 2006) yang menyatakan bahwa kesuksesan suatu organisasi sangatlah ditentukan oleh customer-nya. Dengan demikian, melalui akreditasi tersebut diharapkan persaingan yang terjadi akan semakin ketat dan sehat untuk mewujudkan kualitas layanan pendidikan.

Sebagaimana diketahui, akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan atau program keahlian yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan terhadap satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Akreditasi dilakukan secara adil dan merata baik untuk satuan pendidikan yang

Dalam perspektif ini, akreditasi dapat dijadikan sebagai alat regulasi diri agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan disertai usaha untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Hasil kegiatan akreditasi akan dijadikan rujukan untuk menentukan satuan pendidikan dan program keahlian berstatus terakreditasi atau tidak terakreditasi. Dengan ketentuan ini, pola lama dalam pemberian status sekolah dengan terdaftar, diakui, dan disamakan, menjadi tidak berlaku. Jadi akreditasi pada prinsipnya merupakan pengakuan terhadap kualitas sekolah. Akreditasi ini ada masa berlakunya sehingga harus dievaluasi secara periodik untuk menjaga standar mutu dan kualitasnya. Permasalahannya, bagaimana sekolah dapat menerapkan prinsip-prinsip akreditasi dalam seluruh sistem penyelenggaraan kegiatan di sekolah dalam kurun waktu yang panjang. Bagaimana sekolah dapat menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, obyektifitas dan akuntabilitas. Semua prinsip ini merupakan konsep yang abstrak yang harus bisa diturunkan dalam ranah konkret berupa kegiatan dan tindakan yang dapat diukur dan hasilnya dapat dirasakan oleh para *stakeholder* yang pada akhirnya menentukan *stakeholder* merasa puas atau tidak puas.

Adapun kualitas layanan dalam dunia pendidikan akan digambarkan secara formal melalui pelaksanaan akreditasi yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab XVI, pasal 60). Menurut diktum dalam pasal tersebut, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan akreditasi dimaksudkan untuk

jelas dan terukur. Kebijakan akreditasi sekolah juga didasarkan kepada Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah dan Keputusan Mendiknas Nomor 039/O/2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Keputusan Mendiknas ini penting artinya jika diposisikan sebagai salah satu kesempatan untuk membenahi kinerja pendidikan di negara kita. Siapa pun yang terlibat dalam dunia pendidikan boleh menaruh harapan bahwa implementasi keputusan tersebut lebih baik daripada keputusan sejenis sebelumnya.

Jaminan pengendali mutu pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi sekolah meliputi beberapa aspek. Di antaranya (1) kurikulum dan proses pembelajaran, (2) administrasi dan manajemen sekolah, (3) organisasi dan kelembagaan sekolah, (4) sarana dan prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik, (8) peran serta masyarakat, serta (9) lingkungan dan budaya sekolah.

Namun demikian dalam pelaksanaannya ke-sembilan prespektif tersebut, kerap kali ditemukan beberapa kelemahan ketika proses akreditasi dilakukan. Pertama, penggunaan kurikulum. Dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan dan program keahlian belum mampu memahami maksud kurikulum lokal (*local content*). Umumnya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional 1994 dan 2004 atau yang populer disebut KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Padahal, dalam prinsip pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), keberanian sekolah atau program untuk menerapkan kurikulum lokal yang berbasis pada potensi masyarakat sangat diperlukan. Melalui kurikulum lokal

yang berbasis pada potensi masyarakat sangat diperlukan. Melalui kurikulum lokal

sekaligus menunjukkan ciri khas sebagai keunggulan lokal dan nilai tambah yang berbeda dari sekolah lain.

Kedua, administrasi dan manajemen sekolah. Aspek ini sangat berkaitan dengan pola manajemen dan kepemimpinan yang berlaku di sekolah. Biasanya, kepala sekolah belum mampu menjalankan fungsinya sebagai manager dan pemimpin dengan visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan sekolah. Ini dapat diamati dari belum adanya rencana induk pengembangan sekolah (RIPS) yang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kalaupun ada, RIPS sering tidak didasarkan pada *SWOT Analysis* (analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan). Problem lain berkaitan dengan masalah manajemen dan kepemimpinan adalah pola hubungan sekolah dan yayasan. Problem ini umumnya dialami oleh sekolah swasta.

Selain itu masalah tertib administrasi. Rasanya, masalah ini dialami oleh hampir semua sekolah, negeri maupun swasta. Masalah pengarsipan surat masuk dan keluar, pelaporan keuangan, data ketenagaan, inventaris sekolah, dan dokumen penting lainnya, seringkali ditempatkan secara acak-acakan. Sehingga pada saat dilakukan visitasi oleh tim asesor dalam rangka kegiatan akreditasi, masalah tertib administrasi pasti menjadi momok bagi sekolah.

Ketiga, masalah kualitas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (karyawan). Jujur saja, problem besar yang dihadapi kurikulum model KBK adalah faktor kualitas guru. KBK sangat menekankan pentingnya guru sebagai ujung tombak kesuksesan pembelajaran. Dalam kenyataannya, masih banyak guru yang berkualitas

sekolah telah dikembangkan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Seperti halnya KBK, rasanya KTSP pun akan menghadapi problem guru yang miskin keberanian dan kreatifitas.

Keempat, sumber pendanaan (*fundraising*). Pelibatan *local stakeholders* mutlak dilakukan. *Local stakeholders* adalah mereka yang sangat berkepentingan terhadap *output* dan *outcome* sekolah. Mereka dapat berasal dari wali murid, yayasan, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, kyai, politisi, serta kelompok profesional.

Kelima, penciptaan lingkungan dan budaya sekolah. Aspek ini banyak berkaitan dengan masalah penataan lingkungan dan pencitraan budaya sekolah yang berkarakter sehingga berbeda dengan sekolah lain. Misalnya, aspek sarana peribadatan, kultur akademik, kegiatan ekstra kurikuler, muatan kurikulum lokal, serta kebersihan dan keindahan.

Jika diperhatikan secara seksama berdasarkan sembilan komponen di atas, kegiatan akreditasi hanya akan mampu memotret aspek luar dari sekolah. Sementara yang berkaitan dengan aspek lain, misalnya proses pembelajaran, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, barangkali masih belum mampu tergambar secara kongkrit. Bahkan, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa sesungguhnya sekolah atau program keahlian dapat melakukan "rekayasa" untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Apalagi yang dituntut dari proses akreditasi hanya bukti fisik. Akibatnya, muncul kultur kerja di sekolah dengan sistim SKS (Sistim Kerja Semalam).

Ada kesan dari pengalaman pelaksanaan akreditasi yang telah lampau, akreditasi

... .. administratif kelaka

Tidak dapat dipungkiri adanya anggapan bahwa sebuah lembaga yang baik ditunjukkan juga oleh administrasinya yang baik pula, namun demikian pemahaman tersebut cenderung memunculkan sikap formalitas, baik dari pihak pengawas maupun pihak sekolah. Formalitas yang menyangkut temuan sesaat waktu penilaian berlangsung. Penilaian yang mendasarkan pada "ada" atau "tidak ada" komponen-komponen yang dinilai akan mendorong tindakan mengada-ada. Demi nilai, kelengkapan mesti diadakan meskipun sesaat.

Sudah seharusnya menyelenggarakan semua komponen kependidikan diabdikan untuk perkembangan pribadi siswa yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Hal itu semua mestinya berlangsung dalam keseharian, sekurang-kurangnya terus-menerus diupayakan secara alami memang ada wujudnya, entah ada penilaian ataupun tidak. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan kinerja layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para *stakeholdernya*.

Bertolak dari fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Kepuasan *Stakeholder* di SMA Negeri 8 Yogyakarta." Menurut hemat penulis hal ini penting untuk dilakukan mengingat akreditasi yang telah dilakukan selama ini hanya merupakan pengakuan terhadap kualitas sekolah yang masih sebatas konsep abstrak berupa

Sehingga perlu kiranya akreditasi ini harus mampu diwujudkan dalam ranah konkrit berupa kegiatan dan tindakan yang dapat diukur dan dirasakan hasilnya oleh para stakeholdernya terutama para siswa dan orang tua siswa. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Walikota (UPIK PEMKOT JOGJAKARTA.htm), akreditasi merupakan sebuah penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan jasa pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Masyarakat harus tahu apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan.

1.2 Batasan Masalah

Kualitas layanan dalam dunia pendidikan dapat digambarkan secara formal melalui pelaksanaan akreditasi yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab XVI, pasal 60). Dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan akreditasi dimaksudkan untuk membangun sistem pengendalian kualitas layanan pendidikan dengan barometer yang jelas dan terukur. Jaminan pengendali mutu pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi sekolah meliputi beberapa aspek. Di antaranya (1) kurikulum dan proses pembelajaran, (2) administrasi dan manajemen sekolah, (3) organisasi dan kelembagaan sekolah, (4) sarana dan prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik, (8) peran serta masyarakat, serta (9) lingkungan dan budaya sekolah.

Namun demikian dalam penelitian ini hanya akan melakukan penilaian

kepada para stakeholder khususnya para siswa dan orang tua siswa di mana

kedua pihak ini adalah pihak yang secara langsung dapat menilai dan merasakan aspek-aspek yang ada dalam pelaksanaan akreditasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu :

- 1) Apakah aspek kurikulum dan proses pembelajaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 2) Apakah aspek administrasi dan manajemen sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 3) Apakah aspek organisasi dan kelembagaan sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 4) Apakah aspek sarana dan prasarana secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 5) Apakah aspek ketenagaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 6) Apakah aspek pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?
- 7) Apakah aspek peserta didik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?

9) Apakah aspek lingkungan dan budaya sekolah, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*?

10) Aspek manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan *stakeholder* ?

11) Apakah hasil akreditasi sekolah yang terdiri dari kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, serta lingkungan dan budaya sekolah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder* ?

Aspek manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan *stakeholder* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek kurikulum dan proses pembelajaran secara parsial terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek administrasi dan manajemen sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek organisasi dan kelembagaan sekolah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek sarana dan prasarana

- 5) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek ketenagaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 7) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek peserta didik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 8) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek peran serta masyarakat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 9) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aspek lingkungan dan budaya sekolah, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 10) Untuk mengetahui aspek yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan *stakeholder*.
- 11) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari hasil akreditasi sekolah yang terdiri dari kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, serta lingkungan dan budaya sekolah secara simultan terhadap kepuasan *stakeholder*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritik, penelitian yang dilakukan akan menambah khasanah penelitian-penelitian yang sudah ada di bidang manajemen pendidikan khususnya pengaruh hasil akreditasi sekolah terhadap kepuasan *stakeholder* di lingkungan SMA Negeri 8 Yogyakarta.
- 2) Secara praktis apabila hipotesis penelitian dapat terbukti maka dapat diterapkan di kalangan instansi khususnya di lingkungan SMA Negeri 8 Yogyakarta